

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 11 Oktober 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas Halaman 1	Jumat, 11 Oktober 2019	Merugi Setelah Situ Menjadi Perumahan	Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Alih fungsi puluhan situ di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hanya merugikan warga, tetapi juga pemerintah, Bahkan, pengembang perumahan yang menguasai situ dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan juga ikut merugi.
2	Kompas Halaman Jendela B	Jumat, 11 Oktober 2019	Andalkan Pariwisata Berkelanjutan	Berbagai negara, termasuk Indonesia, menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu andalan penghasilan devisa. Pilihan tersebut tentu tak lepas dari berbagai potensi wisata yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, arti penting pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan semakin menjadi perhatian. Di titik ini, kegiatan ekonomi bersanding dengan kepedulian terhadap aspek ekologi. Berdampingan, bukan saling meniadakan.
3	Bisnis Indonesia Halaman 4	Jumat, 11 Oktober 2019	Ketentuan Insentif Fisikal direvisi	Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan merevisi PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus beserta regulasi turunannya
4	Bisnis Indonesia Halaman 7	Jumat, 11 Oktober 2019	Biaya Kontruksi Membengkak	Direktur Teknik CPT Ari Sunaryono, mengatakan jalan tol Cibitung-Cilincing membentang di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Per 3 Oktober 2019 Progres lahan telah Mencapai 80,12% sedangkan progres konstruksi tercapai 61,24%.
5	Bisnis Indonesia Halaman 7 (2)	Jumat, 11 Oktober 2019	Pembangunan Sirkuit Mandalika	Arief Yahya (tengah) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M.mansoer (kanan) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan maninjau pembangunan Street Circuit Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (10/10).
6	Bisnis Indonesia Halaman 7 (3)	Jumat, 11 Oktober 2019	Pembangunan Tetap Dibutuhkan	Proyek jalan tol pelabuhan II atau Harbuor Road II menuai polemik dari masyarakat, karena dinilai pembangunannya akan memperparah kemacetan dan tidak ramah lingkungan, BPJT menengaskan bahwa tol tersebut merupakan solusi mengatasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.
7	Bisnis Indonesia Halaman 7 (4)	Jumat, 11 Oktober 2019	SMI Siapkan Pembiayaan	PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) masih bertindak sebagai observer dan fasilitator dalam skema rancangan proyek pembangunan infrastruktur calon ibu kota baru.
8	Bisnis Indonesia Halaman 7 (5)	Jumat, 11 Oktober 2019	Waduk Joto Mengering	Warga melihat kondisi Waduk Joto di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/10). Menurut data badan penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten

				Lamongan terdapat 72 desa di 27 kecamatan yang mengalami kekeringan akibat kemarau Panjang.
9	Kompas Halaman 10	Jumat, 11 Oktober 2019	Irigasi Perparah Liikuefaksi	Saluran Irigasi Secara signifikan memperburuk tanah longsor dan likuefaksi yang dipicu gempa bumi berkekuatan M 7,5 di Palu Sulawesi tengah, Tahun 2018, Fenomena itu menunjukkan bahaya saluran irigasi di Kawasan yang dilalui secara aktif.
10	Kompas Halaman 13	Jumat, 11 Oktober 2019	Proyek Tol Jakarta-Cikampek	Pengerjaan Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Proyek jalan sepanjang 39 kilometer itu ditargetkan selesai pada Oktober 2019 dan dibuka Untuk Umum Desember 2019, Keberadaan diharapkan mengurangi kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek.
11	Kompas Halaman 15 (1)	Jumat, 11 Oktober 2019	KEK Khusus Ekspor Disiapkan	Menteri kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Mengatakan, pemerintah akan mengembangkan Kawasan ekonomi Khusus (KEK) di Jawa untuk sector industry yang berorientasi ekspor ataupun substitusi impor.
12	Republika Halaman 15 (2)	Jumat, 11 Oktober 2019	Tol Cibitung-Cilincing Ditargetkan Beroperasi 2020	Pelabuhan Indonesia li (Persero) optimis jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dapat beroperasi secara keseluruhan pada kuartal II 2020 Hal itu seiring progress pembangunannya yang telah mencapai 60 persen lebih.
13	Kompas Halaman 16	Jumat, 11 Oktober 2019	Sirkuit Mandalika Kejar Target Awal 2021	Sebanyak 20.000 tiket menonton balap MotoGP akan dijual Pada November mendatang untuk mengecek anomi dan profil penonton Secara total, progress pengerjaan sirkuit baru 10 persen
14	Kompas Halaman 18	Jumat, 11 Oktober 2019	Penataan Berkelanjutan di 2020	Pengerukan Kali dan waktu di DKI Jakarta mencapai 80 persen memasuki awal musim hujan ini. Pengerukan yang di mulai pada juli lalu ditargetkan selesai saat musim hujan benar-banr tiba jelang akhir tahun ini.

Judul	Merugi Setelah Situ Menjadi Perumahan	Tanggal	Jumat, 11 oktober 2019
Media	Kompas Halaman 1		
Resume	Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Alih fungsi puluhan situ di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hanya merugikan warga, tetapi juga pemerintah, Bahkan, pengembang perumahan yang menguasai situ dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan juga ikut merugi.		

Merugi Setelah Situ

[Sambungan dari halaman 1]

Depok Bakhtiar Ardiansyah mengaku, setidaknya Rp 3 miliar sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Depok untuk membangun pengendali banjir di perumahan Mekar Perdana. "Sebenarnya, logikanya, negara rugi. Namun, jika kami tak akomodasi, tidak kami turap, itu kan warga kami. Mereka bayar pajak ke kami juga. Serba salah juga," katanya.

Sementara Situ Asem di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, telah menjadi perumahan sejak 1998. Situ Asem beralih fungsi menjadi perumahan Tamansari Persada.

Latifah (55), salah seorang penghuni perumahan Tamansari Persada, mengungkapkan, sudah bertahun-tahun tempat tinggalnya jadi langganan banjir. Ia harus memperkuat rumahnya dengan menambah tiang-tiang penyangga karena tanahnya bergeser. Jalan di depan rumahnya pun ambles hingga akhirnya harus ditutup agar tak dilalui kendaraan.

Kepala Seksi Sumber Daya Alam Wilayah II Dinas PUPR Kota Bogor Andi Siswandi mengungkapkan, sejak pengembangan menyerahkan fasilitas sosial dan umum perumahan ke Pemkot Bogor pada 2018, penanganan banjir di perumahan itu menjadi pekerjaan rumah. Setidaknya dibutuhkan biaya Rp 1,7 miliar untuk mengendalikan banjir di perumahan Tamansari Persada. Salah satunya meningkatkan kapasitas drainase yang tak memadai.

Masalah baru

Terbitnya SHM dan HGB di atas areal situ juga menimbulkan masalah baru bagi pengembang, PT Hana Kreasi Persada, yang dimenangkan Pengadilan Tinggi Banten sebagai pemilik lahan di Situ Kayu Antap, Tangerang Selatan, hingga saat ini juga tidak bisa memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) untuk membangun perumahan di areal itu.

Direktur Utama PT Hana Kreasi Persada Hendrik Kadaruman mengungkapkan, HGB yang dimiliki perusahaannya berasal dari SHM atas nama Tadjuddin yang diterbitkan tahun 1974. Tahun 2011, Pemkot Tangerang Selatan memasukkan areal lahannya situ yang dikuasai PT Hana dalam zona biru atau air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Akibatnya, PT Hana tak bisa memperoleh IMB untuk membangun perumahan.

Erwin Kallo, selaku kuasa hukum Hendrik, menilai Pemkot Tangerang Selatan tak mematuhi putusan pengadilan. Menurut dia, kliennya dibiarkan terkatung-katung sehingga tidak bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki. "Kalau seperti ini, kan, modal klien saya di lahan ini jadi *idle* (terhenti)," katanya.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR selaku pengelola situ di Jabodetabek lebih memilih merevitalisasi situ yang masih berfungsi normal. Dari 208 situ yang dikelola BBWSCC, ada 78 situ yang selesai disurvei dan didata kembali. BBWSCC merevitalisasi dengan mengeruk dan membangun *fogging track* sebagai sempadan situ, seperti di Situ Pagan, Babakan, dan Pondok Jatung.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayat mengatakan, pihaknya hanya bisa mencatat situ yang telah menjadi perumahan. Sebab, situ adalah kekayaan negara sehingga tidak bisa dimiliki perorangan atau korporasi. "Kalau mau mengatasi (revitalisasi situ), yang ada saja dulu," katanya. (SPW/ADV/MDN)

RESAPAN AIR

Merugi Setelah Situ Menjadi Perumahan

JAKARTA, KOMPAS — Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Alih fungsi puluhan situ di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tak hanya merugikan warga, tetapi juga pemerintah. Bahkan, pengembang perumahan yang menguasai situ dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan juga ikut merugi.

Sertifikat alas hak di atas situ membuka jalan beralihnya fungsi situ dari kawasan konservasi dan pengendali banjir menjadi perumahan. Situ Ciming di Depok dan Situ Asem di Kota Bogor merupakan sebagian situ di Jabodetabek yang beralih fungsi menjadi perumahan sejak 1980-an. Perubahan fungsi kedua situ itu bermula dari penerbitan HGB di areal situ hingga kemudian didirikan perumahan di atasnya.

Situ Ciming di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kini dikenal sebagai perumahan Mekar Perdana.

Jejak situ masih tampak pada lingkungan perumahan seluas hampir 1 hektar dengan topografi menyerupai mangkuk.

Perumahan dikelilingi tebing setinggi 4-5 meter. Di atas tebing dipadati permukiman dan sebagian tanah kosong.

Tak kurang dari 300 rumah berdiri di perumahan Mekar Perdana yang dibangun PT Antar Samudra Perdana tahun 1986. Dari kopi HGB yang diperoleh *Kompas*, diketahui perumahan berdiri di atas lahan yang dicatat dalam dokumen HGB Nomor 1 dan diterbitkan pada 15 Maret 1986.

Menurut ketua RW di perumahan Mekar Perdana, Sulaelman, sejak 2005, banjir di lingkungan tempat tinggalnya bertambah parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, areal tanah kosong di sekitar perumahan Mekar Perdana mulai dibangun perumahan, tempat ibadah, hingga fasilitas umum lainnya. Akibatnya, seluruh air pembuangan dari hunian di sekitarnya mengalir ke perumahan Mekar Perdana yang berada paling rendah.

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

[Bersambung ke him 11 kol 6-7]

.....

Judul	Andalkan Pariwisata Berkelanjutan	Tanggal	Jumat, 11 oktober 2019
Media	Kompas Halaman Jendela B		
Resume	Berbagai negara, termasuk Indonesia, menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu andalan penghasilan devisa. Pilihan tersebut tentu tak lepas dari berbagai potensi wisata yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, arti penting pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan semakin menjadi perhatian. Di titik ini, kegiatan ekonomi bersanding dengan kepedulian terhadap aspek ekologi. Berdampingan, bukan saling meniadakan.		



Pemandangan pulau-pulau karst di Misool, Kabupaten Raja Ampat waktu lalu.

ANDALKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Berbagai negara, termasuk Indonesia, menempatkan sector pariwisata sebagai salah satu andalan penghasilan devisa. Pilihan tersebut tentu tak lepas dari berbagai potensi wisata yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, arti penting pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan semakin menjadi perhatian. Di titik ini, kegiatan ekonomi bersanding dengan kepedulian terhadap aspek ekologi. Berdampingan, bukan saling meniadakan.

CANTO SAPTOWALYONO

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D Heitubun, pengembangan pariwisata di Papua Barat berori-

entasi pada ekowisata berkelas tinggi. "Tertlahnya, lebih baik kita mengurus 10 orang (wisatawan) yang membayar cukup tinggi daripada 100 atau 1.000 orang (wisatawan), tetapi kemudian membawa dampak kerusakan sumber daya setempat," katanya.

Charlie yang dilemahi di sela-sela Kompas Travel Fair 2019 di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyebutkan, orientasi tersebut merupakan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Apalagi, Papua Barat terkenal sebagai provinsi konservasi pertama di dunia.

Tema utama yang kami bawa ke acara ini adalah langkah besar Papua Barat menjadi provinsi berkelanjutan," ujarnya.

Salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, yakni Raja Ampat, ada di Papua Barat.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, saat ini ada lima destinasi superprioritas yang dikembangkan. Destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likiep (Sulawesi Utara).

Arief menambahkan, infrastruktur dan utilitas dasar di destinasi superprioritas tersebut harus selesai pada 2020. "Jadi, silakan bagi para pemain industri pariwisata untuk ikut terlibat dalam pengembangan lima destinasi super prioritas tersebut," ujarnya.

Sektor pariwisata juga tetap diproyeksikan sebagai sektor penghasil devisa terbesar Indonesia. Devisa sektor pariwisata pada 2018 mencapai 19,3 miliar dollar AS atau melampaui target yang sebesar 17 miliar dollar AS. Tahun ini, devisa sektor pariwisata ditargetkan 20 miliar dollar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi pembicara pada Governors Seminar: Role of Tourism for Sustainable Development, pada pertemuan tahunan ke-52 Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nadi, Fiji, bulan Mei lalu, antara lain mengatakan kombinasi dua hal dalam mengelola pariwisata berkelanjutan.

Kedua hal itu adalah penerapan standar global dan penjagaan kearifan lokal. Standar global, misalnya, pada aspek pengelolaan sampah dan kebersihan, yang mesti diterapkan. Di sisi lain, keotentikan dan kearifan lokal juga tetap dipertahankan.

Sri Mulyani menilai pembahasan isu pariwisata berkelanjutan dalam pertemuan tahunan ADB 2019 tersebut memiliki arti penting. Apalagi, kemurnian dan keindahan kawasan wisata alam hanya akan atraktif jika dijaga kebersihan dan kelestariannya.

"Melalui keberlanjutan tersebut, kita harus mampu mendesain destinasi wisata dengan mempertimbangkan jumlah dan kebiasaan pengunjung," kata Sri Mulyani saat itu.



FOTO: ANANTA YOHANITA

Kawasan wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi destinasi wisata prioritas nasional. Foto sissana di Labuan Bajo pada 10 Juli 2019.

nyiapan komunitas tersebut akan menjadikan obyek wisata menarik.

Apalagi, di era digital, wisatawan—terutama dari generasi milenial—tertarik menikmati pengalaman tertentu. "Saat ini bukan hanya *seeing is believing*, melainkan *experiencing is believing*," ujar Bambang.

Terkait konsep pariwisata berkelanjutan, Bambang mencontohkan Bhutan yang benar-benar peduli untuk melindungi bangunan daya dukung destinasi wisata di sisi lingkungan hidup, sosial, dan kultural dengan jumlah wisatawan.

Di Bhutan, rute wisatawan harus terlebih dulu dilaporkan.

Pengubahan rute perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain pun harus dilaporkan ke imigrasi. Kadang kala perjalanan ke rute baru tersebut harus dapat dilakukan keesokan harinya, tidak bisa mendadak berubah arah.

"Hal ini karena mereka sangat peduli daya dukung. Sebab, semakin padat (rute atau destinasi) semakin kurang dapat menikmati. Jadi, wisatawan bu-

san hanya menguji kuantitas, melainkan juga kualitas pengalaman selama kunjungan," kata Bambang.

Selain orang yang akan masuk ke Bhutan harus belanja, misalnya minimal 250 dollar AS per hari. Angka ini harus diwujudkan dalam belanja hotel, makan, bus, jasa pemandu, dan lainnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, penyajian komunitas merupakan langkah penting karena banyak wisatawan yang ingin mengalami atau menjadi bagian dari aktivitas lokal. Hal ini, antara lain, terwujud dalam bentuk mencari kuliner lokal dan mengalami

aktivitas di persawahan, seperti menanam padi, menghela kerbau, dan menggemala itik, juga bisa menjadi pengalaman menarik bagi sebagian wisatawan.

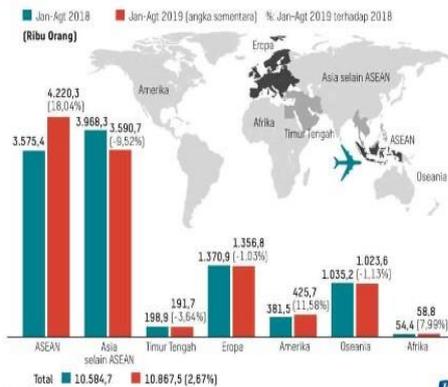
"Jangan sampai komunitas yang memiliki kekayaan aktivitas seperti itu justru berubah drastis sehingga para turis kehilangan sesuatu yang sebelumnya ingin dilaminya," ujar Bambang.

Konektivitas

Sementara, Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono mengatakan, pengembangan pariwisata memerlukan pembangunan konektivitas, baik fisik maupun digital.

Pengembangan pariwisata juga memerlukan pembangunan kesigapan komunitas. Pembangunan konektivitas dan pe-

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan, Agustus 2019



Sumber: BPS

INFOGRAFIK: LEBER

Judul	Ketentuan Insentif Fisikal direvisi	Tanggal	Jumat, 11 oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 4		
Resume	Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan merevisi PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus beserta regulasi turunannya		

► KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Ketentuan Insentif Fisikal Direvisi

Bisnis, JAKARTA — Ketentuan dan skema pemberian insentif fiskal dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan direvisi menyusul banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait aturan yang multitafsir.

Lorenzo Mahardhika, Rizka Hadyan, & M. Wilan
redaksi@bisnis.com

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan merevisi PP No. 96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus beserta regulasi turunannya.

"Ini akan kami ubah karena nantinya bisa memunculkan 'agen' di pemerintahan," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (10/9).

Dalam PP No. 96/2015, investasi dengan nilai lebih dari Rp1 triliun mendapatkan insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20%—100% selama 10 tahun—25 tahun.

Kegiatan utama dengan nilai investasi Rp500 miliar—Rp1 triliun mendapatkan pengurangan PPh sebesar 20%—100% untuk jangka waktu 5 tahun—15 tahun. Khusus untuk KEK Bitung, KEK Sorong, dan KEK Morotai, pengurangan PPh sebesar 20%—100% selama 5 tahun—15 tahun untuk nilai investasi di bawah Rp500 miliar.

Adapun dalam draf perubahannya, besaran dan jangka waktu pemberian insentif bakal menggunakan angka tetap. Seluruh kegiatan usaha di KEK bakal menikmati *tax holiday* sebesar 100%, tetapi jangka waktunya tergantung pada nilai investasi.

Nilai investasi Rp100 miliar—Rp500 miliar akan menerima *tax holiday* selama 5 tahun, kegiatan usaha dengan nilai investasi Rp500 miliar—Rp2,5 triliun selama 7 tahun, nilai investasi Rp2,5 triliun—Rp7,5 triliun selama

► Besaran dan jangka waktu pemberian insentif bakal menggunakan angka tetap.

► KEK masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

10 tahun.

Sedangkan nilai investasi Rp7,5 triliun—Rp20 triliun mendapatkan *tax holiday* hingga 15 tahun, dan kegiatan usaha dengan nilai investasi sebesar Rp20 triliun atau lebih berhak mendapatkan *tax holiday* selama 20 tahun.

Pemerintah juga akan memberikan *mini tax holiday* untuk kegiatan usaha dengan nilai investasi Rp20 miliar—Rp100 miliar sepanjang 5 tahun dengan pengurangan pajak sebesar 50%. Sama seperti *tax holiday*, terdapat masa transisi selama 2 tahun yang mana *mini tax holiday* yang diberikan mencapai 25%.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan saat ini revisi PP telah mendapat persetujuan presiden.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasia Roestani menilai perbaikan harus dilakukan karena aturan yang ada multitafsir dan belum jelas pelaksanaannya di lapangan.

"Kami menemukan juga di lapangan, pelaksanaannya itu belum berjalan mulus seperti yang diharapkan karena banyaknya [aturan] yang multitafsir

antara dunia usaha dan pemerintah. Banyaknya [aturan] yang multitafsir itu harus kita luruskan dan sempurnakan kembali," jelasnya.

Aturan yang hingga kini masih membingungkan pelaku usaha itu mengenai *tax holiday*. Dia menyebut masih ada perbedaan penafsiran mengenai skema atau penentuan waktu pemberian *tax holiday* berdasarkan nilai investasi yang digelontorkan.

EVALUASI

Dari hasil evaluasi, implementasi KEK masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga Oktober 2019, nilai komitmen investasi dari keseluruhan KEK mencapai Rp85,3 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 8.686 orang.

Darmin menilai jumlah tenaga kerja yang terserap dari KEK belum sesuai dengan ekspektasi, padahal nilai komitmen investasi cukup tinggi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pembebasan lahan yang masih terkendala.

Darmin menceritakan pemerintah langsung memproses rancangan peraturan pemerintah (RPP) ketika pembebasan lahan baru mencapai 20%—30%. Hal ini mengakibatkan harga lahan yang menjadi KEK mendadak menjulang tinggi sehingga menyebabkan proses pembebasan lahan terhambat. "Jadi sekarang beli dulu tanahnya baru kami proses RPP-nya," ujar Darmin.

Wahyu Utomo menambahkan fokus utama pemerintah terkait dengan KEK pada 2020 adalah meningkatkan kinerja guna menarik lebih banyak investasi masuk.

Salah satu upaya yang akan didorong adalah peningkatan pembebasan lahan pada KEK yang sudah terbentuk. Sebab, masih cukup banyak lahan pada KEK yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga Oktober 2019,

DAMPAK BELUM MAKSIMAL

Efektivitas KEK ternyata belum maksimal. Baik dari sisi geliat manufaktur maupun penyerapan tenaga kerja. Untuk itu pemerintah akan melakukan perbaikan. Salah satunya adalah perubahan regulasi mengenai insentif fiskal agar lebih memberikan kepastian dalam berusaha.

KEK terdiri atas beberapa zona, yaitu:



Sumber: Dewan Nasional KEK

Bisnis.com/10/09/2019

masih banyak lahan pada sejumlah KEK yang belum digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung.

"Lahan-lahan di KEK sudah siap semua. Hanya tinggal bagaimana kami bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Kamar Dagang dan Industri [Kadin] Indonesia untuk membawa investor pada KEK," kata Wahyu.

Selain itu, pemerintah juga telah meminta pengelola KEK yang sudah ada untuk membuat rencana aksi serta target-target yang hendak dicapai. Laporan tersebut, lanjut Wahyu, yang bersifat seperti *key performance indicator* (KPI), akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah terkait status KEK yang diberlakukan.

"Kami juga akan melakukan penyederhanaan prosedur-prosedur yang dirasa memberatkan untuk mempermudah penyelenggaraan dan pengelolaan KEK," tambah Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoch Suharto Pranoto mengatakan sejumlah KEK yang baru diberlakukan akan diberikan target tertentu dari pemerintah sesuai dengan bidangnya.

Dia mencontohkan KEK Kendal yang ditargetkan menyumbang nilai ekspor sebesar US\$5 miliar per tahun selama 5 tahun mendatang.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan efektivitas status KEK sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.

Kerja sama yang baik antara kedua pihak akan memunculkan pengelolaan KEK yang profesional dan efisien. "Mereka harus bisa saling bekerja sama, karena yang banyak menarik investor, terutama dari luar negeri, adalah pihak swasta," ujar Sanny. ▢

Judul	Biaya Konstruksi Membengkak	Tanggal	Jumat, 11 oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Direktur Teknik CPT Ari Sunaryono, mengatakan jalan tol Cibitung-Cilincing membentang di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Per 3 Oktober 2019 Progres lahan telah Mencapai 80,12% sedangkan progres konstruksi tercapai 61,24%.		

► **TOL CIBITUNG-CILINCING**

Biaya Konstruksi Membengkak

Bisnis, BEKASI — PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) memproyeksi jalan tol Cibitung-Cilincing (tol Cicing) yang menjadi akses baru Pelabuhan Tanjung Priok itu bakal rampung pada tahun depan. Biaya proyek tol tersebut membengkak akibat perubahan desain konstruksi.

Rivki Maulana
rivki.km@bisnisid.com

Direktur Teknik CTP Ari Sunaryono, mengatakan jalan tol Cibitung-Cilincing membentang di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Per 3 Oktober 2019 progres lahan telah mencapai 80,12% sedangkan progres konstruksi tercapai 61,24%.

Progres lahan dan konstruksi proyek wilayah Jawa Barat lebih cepat ketimbang di wilayah DKI Jakarta. Ari menjabarkan progres pada sisi Jawa Barat sejauh 30,17 kilometer mencapai 87,17% untuk lahan dan 72,12% untuk konstruksi. Adapun, progres lahan dan konstruksi di wilayah DKI Jakarta sepanjang 4,58 kilometer masing-masing mencapai 25,14% dan 19,24%.

"Progres di sisi Jakarta memang lebih lambat karena *start*-nya juga tertinggal. Penlok [penetapan lokasi] baru terbit Oktober 2017 sehingga pengadaan tanahnya juga telat," jelasnya di Bekasi, Kamis (10/10).

Keterlambatan pengadaan lahan di sisi Jakarta membuat target pengoperasian jalan tol Cicing juga mengalami pemunduran. Semula, jalan tol yang masuk koridor Jalan Lingkar Luar Jakarta II ini dijadwalkan beroperasi pada 2019.

Kendati demikian, Ari menyebut progres proyek tetap sesuai harapan. Pasalnya, pembangunan jalan tol tersebut cukup menantang yang mana jalan tol dibangun di atas kontur lahan yang beragam.

Di samping itu, proyek jalan tol

► **Keterlambatan pengadaan lahan di sisi Jakarta membuat target pengoperasian jalan tol Cicing juga mengalami pemunduran.**

itu juga bersinggungan dengan tiga proyek infrastruktur lainnya, yaitu di Simpang Susun Cibitung. Lokasi itu menjadi pertemuan proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan jalan tol Cimanggis-Cibitung.

Ari menambahkan biaya pembangunan jalan tol Cicing mengalami kenaikan pesat. Dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang diteken perseroan pada Agustus 2011, pembangunan tol Cicing di-taksir menelan biaya Rp4,2 triliun. Namun, taksiran tersebut berubah saat konstruksi dimulai pada 2017. "Sekarang nilai investasinya Rp10,8 triliun dan kami sudah konsultasi [dengan regulator]," ujarnya.

Menurutnya, perubahan taksiran biaya investasi disebabkan perubahan desain konstruksi. Pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing sangat menantang karena dibangun di atas kontur lahan yang beragam sepanjang trase. Selain itu, trase jalan tol bersinggungan dengan utilitas publik seperti jalur pipa, jalan bukan tol, dan kanal banjir.

Pemimpin Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Yaya Uhiya, menambahkan, trase sepanjang 26,2 kilometer dibangun dengan konstruksi tiang pancang (*pile slab*).

Sementara itu, sisanya dibangun dengan metode timbunan tanah atau *at grade* sejauh 6 kilometer dan melayang (*elevated*) sepanjang 1,8 kilometer.

Yaya mengatakan kontur tanah lunak sedalam lebih dari 20 meter menjadi musabab jalan tol tak bisa dibangun dengan menimbun tanah (*at grade*), metode yang paling murah.

Selain tanah lunak, trase jalan tol Cibitung-Cilincing juga melintasi rawa sehingga membutuhkan meto-

Percepat ke Tanjung Priok

Pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34 kilometer bakal rampung pada tahun depan. Jalan tol yang membentang di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta tersebut akan menjadi akses baru sekaligus jalan pintas dari kawasan industri di Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Profil Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing



de tiang pancang untuk menopang struktur jalan tol.

"Jadi secara konstruksi, tol ini kompliit karena ada *at grade*, *elevated*, dan *pile on slab*," ujarnya.

Di sisi lain, CTP sudah mengamankan pendanaan untuk proyek jalan tol lewat pinjaman sindikasi perbankan senilai Rp7,4 triliun atau hampir 70% dari total investasi. Adapun sisa pendaan ditopang setoran modal pemegang saham, yaitu PT Waskita Toll Road (WTR) dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). WTR memiliki saham CTP sebesar 55 persen sedangkan API mengenggam 45 persen.

JALUR ALTERNATIF

Setelah rampung, jalan tol Cibitung-Cilincing akan menjadi alternatif menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Konektivitas antara kawasan industri di Bekasi dan pelabuhan juga diyakini bakal lancar.

Sebagaimana diketahui kawasan

industri di Bekasi saat ini terfokus di wilayah yang dekat dengan akses jalan tol Jakarta-Cikampek. Pasalnya, jalan tol yang sudah beroperasi sejak 1984 itu menjadi akses tol utama untuk menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk diketahui, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) juga punya andil dalam pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Pelindo II memiliki 45% saham CTP melalui entitas anak PT Akses Pelabuhan Indonesia. Sementara itu, sisa saham sebesar 55% dimiliki oleh PT Waskita Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Wakil Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Eko Afrilianto mengatakan jalan tol Cibitung-Cilincing akan menjadi akses baru sekaligus jalan pintas dari kawasan industri di Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini, di luar jalan nasional, akses utama menuju Tanjung Priok dari Bekasi hanya tersedia satu jalan tol, yaitu Jakar-

ta-Cikampek.

"Dari Bekasi ke Priok kan masuknya dari [jalan tol] Jakarta-Cikampek, terus saja Cawang atau lewat JORR [Jakarta Outer Ring Road]. Tetapi sekarang kan [lalu lintas] sudah padat, sehingga waktu tempuh tidak menentu," jelasnya.

Menurut Eko, pengoperasian jalan tol Cibitung-Cilincing akan menjamin waktu tempuh menuju Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu mencapai satu jam, lebih singkat dibandingkan dengan melalui jalan tol Jakarta-Cikampek selama tiga jam.

Eko menjelaskan dengan penurunan waktu tempuh, angkutan logistik akan lebih produktif karena ritase meningkat. Dengan kata lain, dalam periode waktu yang sama, jumlah rit yang dihasilkan lebih tinggi.

"Kami juga berharap ada perubahan pola transportasi. Kendaraan berat kami harapkan lewat JTCC [jalan tol Cibitung-Cilincing] sehingga kepadatan di ruas lain berkurang," jelasnya. □

Judul	Pembangunan Sirkuit Mandalika	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7 (2)		
Resume	Arief Yahya (tengah) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M.mansoer (kanan) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan maninjau pembangunan Street Circuit Mandalika, Pujut, Praya, Lombok tengah, NTB, Kamis (10/10).		

► **PEMBANGUNAN SIRKUIT MANDALIKA**



Antara/Ahmad Subaidi

Menteri Pariwisata Arief Yahya (*tengah*) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer (*kanan*) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan meninjau pembangunan Street Circuit Mandalika di The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (10/10). Saat

ini Right of Way (ROW) lintasan sepanjang 4,3 kilometer telah bisa dilewati sepenuhnya serta progres *ground work* mencapai 30% dengan target selesai pada akhir 2020 untuk segera diuji kelayakan jelang Mandalika MotoGP 2021.

Judul	Pembangunan Tetap Dibutuhkan	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7 (3)		
Resume	Proyek jalan tol pelabuhan II atau Harbuor Road II menuai polemik dari masyarakat, karena dinilai pembangunannya akan memperparah kemacetan dan tidak ramah lingkungan, BPJT menengaskan bahwa tol tersebut merupakan solusi mengatasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.		

► PROYEK HARBOUR ROAD II

Pembangunan Tetap Dibutuhkan

Bisnis, JAKARTA — Proyek jalan tol pelabuhan II atau Harbour Road II menuai polemik dari masyarakat, karena dinilai pembangunannya akan memperparah kemacetan dan tidak ramah lingkungan. BPJT menegaskan bahwa tol tersebut merupakan solusi mengatasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Media sosial diramaikan oleh kecaman masyarakat atas pembangunan jalan tol itu yang dipicu unggahan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait pembangunan di atas jalan tol eksis Wiyoto Wiyono sepanjang 37 km itu.

Hal itu dipicu oleh postingan seorang warganet di unggahan BPJT tersebut dan menilai bahwa pembangunan tol Harbour Road II yang sudah dicanangkan pada Sabtu (5/10) itu bakal memperparah kondisi kemacetan dan menimbulkan pencemaran udara yang tinggi. Warganet juga membuat

tagar *#tolakharbourroad2*.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJT Danang Parikesit, mengatakan bahwa memang harus mencari solusi terbaik karena pembangunan ini mengurai kemacetan.

“Tol ini mengakomodasi *through traffic* terutama untuk angkutan barang, karena pilihan lain adalah tetap *stuck in traffic* atau *rerouting* pakai Tol JORR 2, atau pakai *KARING road* yang sampai sekarang belum terwujud,” ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (10/10).

Kementerian Perhubungan sebelumnya melansir, pergerakan truk dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 12.000 unit setiap pekan.

Danang menambahkan, apabila tidak ada solusi atau tidak melakukan apa-apa maka Jakarta akan semakin semrawut, sehingga dia mengharapkan semuanya bisa disikapi dengan bijak. *(Krizia Putri Kinanti)*

Judul	SMI Siapkan Pembiayaan	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7 (4)		
Resume	PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) masih bertindak sebagai observer dan fasilitator dalam skema rancangan proyek pembangunan infrastruktur calon ibu kota baru.		

► PROYEK IBU KOTA BARU

SMI Siapkan Skema Pembiayaan

Bisnis, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) masih bertindak sebagai *observer* dan fasilitator dalam skema rancangan proyek pembangunan infrastruktur calon ibu kota baru.

Setelahnya, perseroan di bawah Kementerian Keuangan ini akan ikut terlibat di dalam penyusunan skema pembiayaan, terutama yang melibatkan *creative finance*.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad, mengatakan bahwa perencanaan pembangunan ibu kota baru masih di ranah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

"Kami saat ini terlibat sebagai *observer*. Jadi di dalam perencanaan nantinya akan didefinisikan gambaran, dan rencana sumber dana. Ketika sudah jelas kami akan terlibat untuk memikirkan skema-skema pembiayaan terutama yang melibatkan *creative finance*," ujarnya di acara *PT SMI & Media Meet Up 2019*, Kamis (10/10).

Edwin pun memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang diincar PT SMI adalah proyek dalam kewenangan pemerintah kota.

Menurutnya, sejumlah proyek yang kemungkinan

akan digarap SMI adalah proyek perumahan, utilitas yang kewenangannya di daerah seperti penyediaan air minum, pengolahan air kotor, dan transportasi publik.

"Proyek-proyek tersebut seharusnya bisa dibuat skema yang lebih baik dan bisa melibatkan badan usaha. *Infrastruktur basic* tersebut diharapkan skemanya lebih kreatif dan tidak terlalu membebani APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]," paparnya.

Diketahui, pemerintah mengupayakan beragam alternatif pembiayaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang butuh sekitar

Rp486 triliun. Bappenas menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), kata Edwin, membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,88 triliun pada triwulan III/2019 dan total aset naik 22,75% per September 2019 (tahunan) menjadi Rp73,03 triliun.

Dia mengatakan bahwa PT SMI masih terus mengalami tren positif bila ditinjau dari total pembiayaan dan investasi yang telah digelontorkan dalam periode Januari—September 2019. (Aprianus Doni T)

Judul	Waduk Joto Mengering	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7 (5)		
Resume	Warga melihat kondisi Waduk Joto di Desa Jotosanur, kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/10). Menurut data badan penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupeten Lamongan terdapat 72 desa di 27 kecamatan yang mengalami kekeringan akibat kemarau Panjang.		

► **WADUK JOTO MENGERING**



Antara/Syaiful Arif

Warga melihat kondisi Waduk Joto yang kering di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/10). Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan terdapat 72 desa di 27 Kecamatan yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang.

Judul	Irigasi Perparah Likuefaksi	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 10		
Resume	Saluran Irigasi Secara signifikan memperburuk tanah longsor dan likuefaksi yang dipicu gempa bumi berkekuatan M 7,5 di Palu Sulawesi tengah, Tahun 2018, Fenomena itu menunjukkan bahaya saluran irigasi di Kawasan yang dilalui secara aktif.		

Irigasi Perparah Likuefaksi

Kerentanan likuefaksi di Indonesia tinggi. Hasil studi menunjukkan, saluran irigasi memperburuk tanah longsor dan likuefaksi yang dipicu gempa bumi di Palu.

JAKARTA, KOMPAS — Saluran irigasi secara signifikan memperburuk tanah longsor dan likuefaksi yang dipicu gempa bumi berkekuatan M 7,5 di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018. Fenomena itu menunjukkan bahaya saluran irigasi di kawasan yang dilalui sesar aktif.

Demikian kesimpulan studi ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional *Nature Geoscience* bertepatan dengan satu tahun bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. "Daerah yang likuefaksinya dipengaruhi adanya aliran irigasi ialah Petobo di Palu dan dua daerah di Sigi, yaitu Sidera dan Sibulaya," kata Ella Meilanda, peneliti dari Tsunami Disaster and Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Aceh, yang terlibat riset itu, Kamis (10/10/2019).

Kajian yang dipimpin ilmuwan dari Earth Observatory of Singapore Universitas Teknologi Nanyang (EOS NTU), Singapura, itu juga diikuti peneliti dari Amerika Serikat, Inggris, China, dan Australia.

Sebagaimana diberitakan, likuefaksi dahsyat terjadi di Palu dan Sigi sesaat setelah terjadi gempa tahun lalu. Likuefaksi itu terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya yang terparah di Petobo, Balaroa, Sidera, dan Sibulaya. Menurut Ella, di antara empat lokasi itu, likuefaksi yang dipengaruhi ada saluran irigasi Gumbasa ialah Petobo, Balaroa, dan Sidera. Tiga lokasi itu berada di bawah aliran irigasi. Balaroa punya mekanisme lain.

"Temuan ini menjadi peringatan bagi tiap area yang dilalui saluran irigasi dan patahan aktif," kata Kyle Bradley, peneliti utama di EOS NTU yang memimpin kajian.

"Kita perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanah longsor terkait pencairan tanah (likuefaksi) dan mewaspadaai tempat-tempat yang saluran irigasinya secara artifisial mengangkat permukaan air," ujarnya. Dengan menganalisis gambar satelit yang diambil sebelum dan sesudah gempa untuk mengidentifikasi area terdampak tanah

longsor dan likuefaksi, para peneliti menemukan sawah dan ladang yang teraliri irigasi terdampak, sedangkan area yang ditanami pohon lebih stabil.

Hal itu menunjukkan, irigasi memengaruhi terjadinya likuefaksi. Pemetaan citra satelit ini dilengkapi pengamatan lapangan oleh tim ilmuwan yang dipimpin Ella Meilanda.

Hasil kajian mengungkap, tanah longsor dan likuefaksi di Lembah Palu terutama dipicu pencairan yang meluas di area di bawah aliran irigasi Gumbasa untuk padi. Saluran air yang dibangun sejak masa kolonial Belanda itu awalnya untuk mengairi sawah.

Namun, hal itu menaikkan muka air hingga mendekati permukaan tanah. Ketinggian air meningkatkan potensi likuefaksi, yakni situasi ketika sedimen yang terkubur jadi seperti fluida karena kuatnya gempa.

Kombinasi sedimen seperti cairan ini dan kemiringan dasar lembah memperburuk bencana, menciptakan penyebaran lateral yang luas dari air, tanah

longsor, dan puing-puing, yang melanda desa-desa. "Faktor utama penyebab likuefaksi ialah tingginya muka air tanah dan adanya lapisan tanah yang mengandung pasir," kata Ella.

Jika suatu wilayah memiliki dua faktor ini, dengan intensitas getaran seismik tertentu, hal itu akan menyebabkan hilangnya daya dukung tanah karena air yang tadinya mengisi pori-pori keluar dan naik ke permukaan. Dalam kasus likuefaksi yang terjadi di daerah dengan kemiringan seperti di Lembah Palu, likuefaksi bisa memicu perpindahan atau pergerakan massa tanah.

"Untuk kasus Balaroa bukan dipengaruhi irigasi, tetapi kemungkinan akibat ada *sand blow* akibat pecahnya lapisan akuifer di bawah tanah yang mengalami tekanan tinggi akibat aktivitas seismik yang terjadi saat itu," ujarnya.

Kerentanan ke depan

Ella mengatakan, temuan di Lembah Palu ini menjadi perhatian di daerah lain. Keren-

tanan likuefaksi di Indonesia tinggi, terutama di wilayah pesisir yang terbentuk pada zaman Holocene atau kurang dari 5000 tahun lalu. Apalagi jika wilayah ini awalnya berupa sungai-sungai purba atau merupakan wilayah pesisir pantai yang membawa dan mengendapkan sedimen pasir.

Dalam perkembangan selanjutnya, sungai dan pantai purba itu tertimbun endapan aluvial dan membentuk wilayah pesisir modern seperti saat ini. "Wilayah pantai Banda Aceh, misalnya, dengan kondisi pembentukan dataran pesisirnya seperti ini, mempunyai kerentanan terjadi likuefaksi," kata Ella.

Meski demikian, menurut Bradley, bahaya yang diciptakan manusia kerap lebih mudah dimoderasi daripada bahaya alam lain. "Berdasarkan ketahanan relatif dari area yang ditanami tanaman pohon campuran dan lahan beririgasi, kami mengusulkan penanaman lebih banyak untuk mengurangi bahaya tanah longsor besar di masa depan," kata Bradley. (AIK)

Judul	Proyek Tol Jakarta-Cikampek	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Pengerjaan Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Proyek jalan sepanjang 39 kilometer itu ditargetkan selesai pada Oktober 2019 dan dibuka Untuk Umum Desember 2019, Keberadaannya diharapkan mengurangi kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek.		

Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek



KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengerjaan proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di kawasan Jakasampurna, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Proyek jalan sepanjang 39 kilometer itu ditargetkan selesai pada Oktober 2019 dan dibuka untuk umum Desember 2019. Keberadaannya diharapkan mengurangi kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Judul	KEK Khusus Ekspor Disiapkan	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 15 (1)		
Resume	Menteri kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Mengatakan, pemerintah akan mengembangkan Kawasan ekonomi Khusus (KEK) di Jawa untuk sector industry yang berorientasi ekspor ataupun subsidi impor.		

KEK Khusus Ekspor Disiapkan

● MUHAMMAD NURSAMSAYI

Kadin menilai, regulasi multitafsir perlu dihilangkan.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Jawa untuk sektor industri yang berorientasi ekspor ataupun substitusi impor. Darmin menyebut, beberapa sektor yang bisa masuk dalam industri berorientasi ekspor, seperti makanan dan minuman hingga tekstil.

"Kriterianya di Jawa kalau KEK mau dikembangkan fokus pada industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor. Itu artinya industri itu belum ada di Indonesia, tapi kita perlu," ujar Darmin seusa melakukan perpanjangan kerja sama pengembangan KEK dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10).

Darmin mengatakan, sejumlah upaya dilakukan pemerintah agar pengembangan KEK mampu mendorong minat para investor. Darmin mengklaim, KEK berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia

memerinci, pada 2012 baru ada dua KEK yang ditetapkan, yaitu KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dan KEK Tanjung Lesung di Kabupaten Pangdeglang, Banten. Jumlah KEK kemudian meningkat pesat menjadi delapan KEK pada 2014 dan hingga Oktober 2019 telah berkembang menjadi 13 KEK.

Darmin mengatakan, komitmen investasi di seluruh KEK yang tersebar di Indonesia hingga Oktober 2019 telah mencapai Rp 85,3 triliun dan sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 8.686 orang.

Darmin menyebut, hingga saat ini jumlah KEK yang telah beroperasi sejumlah 10 kawasan, yaitu KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Bitung (Sulawesi Utara), dan KEK Morotai (Maluku Utara). Selain itu, juga KEK Maloy Bahatu Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), KEK Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), KEK Arun Lhokseumawe (Aceh), serta KEK Galang Batang (Kepulauan Riau).

"Selanjutnya, KEK Sorong (Papua Barat) akan menjadi KEK kesebelas yang rencananya akan diresmikan operasionalnya esok hari (hari ini)," ujar Darmin.

Sementara, dua KEK lainnya, yakni KEK Singasari baru saja ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 serta

KEK Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, yang telah lebih dahulu ditetapkan statusnya sebagai KEK, kini sedang bersiap masuk tahap operasional.

Darmin menambahkan, selain 13 KEK yang telah ditetapkan, empat KEK dalam proses untuk ditetapkan, yaitu KEK Kendal (Jawa Tengah), KEK Lingsing (Sulawesi Utara), KEK Nongsa (Batam), dan KEK MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) di Batam.

"Pemerintah punya target pengembangan 17 KEK hingga akhir 2019 dan target tersebut bisa dicapai," kata Darmin.

Darmin menjelaskan, KEK telah menjadi penggerak perekonomian daerah. Dia mencontohkan, KEK Galang Batang di Kepulauan Riau akan menjadi pusat hilirisasi bauksit terintegrasi dengan komitmen investasi Rp 36,250 triliun hingga 2023.

Dengan hadirnya KEK Galang Batang, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau meningkat 25,80 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat 15,58 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2018 dan akan terus meningkat seiring perkembangan investasi yang masuk ke KEK Galang Batang.

Darmin melanjutkan, di KEK Mandalika (Lombok, NTB) sedang dibangun hotel-hotel kelas dunia, seperti Pullman, Royal Tulipe, dan

Paramount serta sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah gelaran MotoGP pada 2021. Komitmen investasi di kawasan wisata ini mencapai Rp 17,5 triliun.

"Data perkembangan kunjungan wisatawan Kabupaten Lombok Tengah 2015-2018 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 361 persen dan wisatawan nusantara naik 170 persen," ujar Darmin.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasia Roslan mengaku telah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan fungsi KEK. Rosan menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar keberadaan KEK menarik investor masuk di tengah kondisi perang dagang global.

"Nyatanya kita tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang terus reformasi dirinya sehingga iklim investasinya meningkat. Ini kita ada KEK yang memiliki potensi," kata Rosan.

Rosan mengatakan, Kadin dan pemerintah sepakat perlu ada penyempurnaan secara berkala agar KEK benar-benar bisa mengundang daya tarik investor masuk.

"Regulasi yang sifatnya multitafsir bisa dihilangkan sehingga kita punya arahan jelas. Ini penting bagi kita di dunia usaha," ujar Rosan.

■ ed.ahmad fikri noor

Judul	Tol Cibitung-Cilincing Ditargetkan Beroperasi 2020	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Republika Halaman 15 (2)		
Resume	Pelabuhan Indonesia II (Persero) optimis jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dapat beroperasi secara keseluruhan pada kuartal II 2020. Hal itu seiring progress pembangunannya yang telah mencapai 60 persen lebih.		

Tol Cibitung-Cilincing Ditargetkan Beroperasi 2020

JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) optimis Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dapat beroperasi secara keseluruhan pada kuartal II 2020. Hal itu seiring progress pembangunannya yang telah mencapai 60 persen lebih.

Berdasarkan laporan terbaru PT Cibitung Tanjung Priok Port (CTP) Tollways selaku badan usaha jalan tol (BUJT) pembangunan JTCC, tahap konstruksi tol tersebut saat ini telah mencapai 61,24 persen dan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 80,15 persen.

"Maka kita targetkan 2020 nanti bisa beroperasi. Karena pembebasan lahannya kita kejar seluruhnya sampai akhir tahun ini," kata Direktur Teknik IPC Dani Rusli di Cibitung, Jawa Barat, Kamis (10/10).

Pembangunan JTCC diklaim bakal memperlancar akses transportasi dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di Bekasi, Cibitung, Cikarang, hingga Karawang dan sebaliknya. Dia menyebut, keberadaan akses tol nantinya dapat menekan biaya logistik dan mengurangi biaya kemacetan di sekitar ruas tol Jakarta-Cikampek.

Adapun ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing dibangun oleh PT CTP Tollways. Sedangkan, saham

PT CTP Tollways dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) sebesar 45 persen yang merupakan cucu usaha IPC dan PT Wasikita Toll Road sebanyak 55 persen. Total investasi pembangunannya mencapai Rp 10,8 triliun dengan 70 persen dari biaya investasi diperoleh dari pinjaman sindikasi perbankan dan sisanya 30 persen diperoleh dari ekuitas.

Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Akses Pelabuhan Indonesia Ari Sunaryono menjelaskan, jalan tol sepanjang 34,8 kilometer ini sebagian besar berada di wilayah Bekasi, yakni sebanyak 80 persen. Sekitar 20 persen lainnya, kata dia, berada di wilayah Jakarta bagian utara.

Dia menyebut, efisiensi JTCC nantinya dapat menekan biaya logistik melalui penghematan waktu. "Kalau sekarang jarak tempuhnya masih tiga sampai empat jam, nanti kalau tolnya jadi itu bisa mempersingkat waktu tempuh jadi satu jam saja. Logistik *kon* terkait biaya dan waktu," ujar Ari.

Sebagai catatan, akses JTCC merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR 2). Ruas ini terdiri dari empat seksi, yaitu Cibitung-Telaga Asih sepanjang 3,14 kilometer (km), Telaga Asih-Tambelang sepanjang 10,30 km, Tambe-

lang-Tarumajaya sepanjang 14,3 km, dan Tarumajaya-Cilincing sepanjang 7,10 km.

Sepanjang Jalan Tol Cibitung-Cilincing terdapat 43 jembatan, lima simpang susun, tujuh *underpass*, dan delapan *overpass*. Penumpukan pembangunan proyek dan jalan *existing* membuat pembangunan JTCC memiliki kompleksitas yang tinggi. Hanya, Ari mengungkapkan, pihaknya terus bekerja dengan perhitungan elevasi yang seakurat mungkin.

"Jalan ini dibuat dengan perhitungan elevasi seakurat mungkin untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Apalagi, nantinya sebagian besar pengguna jalan adalah truk kontainer dan angkutan barang yang memiliki bobot dan ukuran relatif besar," ujarnya.

Ari menambahkan, JTCC merupakan proyek strategis nasional, yang seluruh pekerjaannya dilakukan oleh tenaga ahli dalam negeri dan pekerja lokal. Sebelumnya, pembangunan JTCC awalnya ditargetkan rampung pada 2019. Target pembangunan tersebut direvisi hingga kuartal II 2019 karena adanya sejumlah tantangan baik dari aksesibilitas, struktur tanah, hingga perhitungan kecermatan kerja.

■ mas damayanti ■ ahmad fikri noor

Judul	Sirkuit Mandalika Kejar Target Awal 2021	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 16		
Resume	Sebanyak 20.000 tiket menonton balap MotoGP akan dijual Pada November mendatang untuk mengecek animo dan profil penonton Secara total, progress pengerjaan sirkuit baru 10 persen		

Sirkuit Mandalika Kejar Target Awal 2021

Sebanyak 20.000 tiket menonton balap MotoGP akan dijual pada November mendatang untuk mengecek animo dan profil penonton. Secara total, progres pengerjaan sirkuit baru 10 persen.

PRAYA, KOMPAS — Pemerintah terus mengejar gelaran balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, benar-benar terwujud di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tahun 2021. Di tengah progres pembangunan sirkuit yang masih 10 persen, sebanyak 20.000 tiket *presale* akan dijual pada November mendatang.

Saat ini, selain pekerjaan fisik, fasilitas pendukung mulai disiapkan. Khusus pekerjaan *ground work* sirkuit mencapai 30 persen, yang meliputi pembersihan, penggalian, dan pemagaran lahan.

"Setelah *ground work*, dilanjutkan pelapisan atas atau pengaspalan pada bulan Desember oleh Waskita Karya dan Vinci Construction," kata Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer saat mendampingi Menpar Arief Yahya mengunjungi proyek di Mandalika, Kamis (10/10/2019).

Kemarin, area bebas (*right of*

way/ROW) untuk lintasan sirkuit sepanjang 4,3 kilometer telah bisa dilewati sepenuhnya. Di beberapa titik, petugas dengan alat berat masih bekerja, termasuk truk.

Kondisinya masih berupa tanah. Nantinya, lintasan itu akan digali 1 meter. Di sana akan diletakkan alat penahan sebelum pengaspalan.

"Sudah kelihatan bentuk sirkuitnya. Kami perlu percepatan karena target sangat ketat untuk 2021. Targetnya, awal 2021 sudah uji coba dan pada akhir 2021 balapan," kata Mansoer.

Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika akan berbentuk *street race*. Konsepnya bukan sirkuit tertutup seperti tempat lain. Saat tidak ada balapan akan menjadi jalur lingkar.

"Nanti akan ada akses menuju kawasan tengah sirkuit berupa kanal-kanal di sisi utara, selatan, dan barat. Sirkuit di Mandalika satu-satunya sirkuit di dunia yang tengahnya dimanfaatkan untuk destinasi pariwisata," kata Mansoer.

Selain pekerjaan fisik, Direktur Konstruksi dan Operasi

ITDC Ngurah Wirawan mengatakan, mereka juga akan mengerjakan hal lain, seperti perencanaan lalu lintas, *signage* (tanda atau penunjuk jalan), dan zonasi fasilitas pendukung.

"Tidak cukup hanya punya sirkuit, perlu juga tempat parkir motor, mobil, dan bus. Selain itu, perlu juga tempat pesta karena *nonton* MotoGP tidak sekadar untuk balapan, tetapi juga pendukung lain, seperti konser musik, budaya, sehingga perlu disiapkan," kata Ngurah.

Selain itu, disiapkan juga area *glamping* atau area berkemah mewah. Pola ini diterapkan pengelola sirkuit MotoGP, seperti di Philip Island Australia.

Sistem keselamatan dan keamanan pun disiapkan di sirkuit dengan kapasitas 100.000 penonton. Dibuat pula parameter-parameter pengamanan, seperti sistem masuk, tribun, patroli, termasuk evakuasi pembalap dan pengunjung.

Selain itu, mitigasi bencana juga jadi perhatian. ITDC, kata Ngurah, juga mulai menyiapkan *shelter* atau tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana

alam. Saat ini, sudah ada satu dari 12 *shelter* yang akan dibangun di KEK Mandalika.

Penjualan tiket

Untuk melihat animo masyarakat, akhir November 2019, ITDC bersama Dorna selaku organisasi penyelenggara MotoGP akan mulai menjual tiket *presale*. "Bersama Dorna selaku pemilik balapan, kami sepakat melempar 20.000 tiket untuk melihat animo," kata Mansoer.

Penjualan awal dilakukan untuk melihat gambaran profil penonton. Terkait harga, kata Mansoer, sudah ditetapkan. Namun, belum bisa mereka rilis.

Secara khusus, Arief optimistis ajang MotoGP bisa menarik 100.000 wisatawan. Penggemar di Indonesia juga sangat besar.

Terkait persoalan lahan, termasuk klaim warga atas bekas jalan desa di Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta (area inti sirkuit), kata Arief, persoalan seperti itu umum terjadi. "Di sini (Mandalika) mengalami hal sama. Tetap hal itu akan diselesaikan ITDC dibantu pemerintah," katanya. (ZAK)

Judul	Penataan Berlanjut di 2020	Tanggal	Jumat, 11 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 18		
Resume	Pengerukan Kali dan waktu di DKI Jakarta mencapai 80 persen memasuki awal musim hujan ini. Pengerukan yang di mulai pada juli lalu ditargetkan selesai saat musim hujan benar-banr tiba jelang akhir tahun ini.		

Penataan Berlanjut di 2020

Pengerukan sungai dan waduk agar daya tampungnya maksimal menjadi andalan antisipasi banjir tahun ini. Pada 2020 nanti, penataan sungai diharapkan bisa segera dilanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengerukan kali dan waduk di DKI Jakarta mencapai 80 persen memasuki awal musim hujan ini. Pengerukan yang dimulai pada Juli lalu ditargetkan selesai saat musim hujan benar-benar tiba jelang akhir tahun ini.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, semua waduk dan sungai di bawah tanggung jawab Dinas SDA sudah dikeruk dan sebagian masih diproses. Sungai ini meliputi semua sungai dan saluran mikro di Jakarta, kecuali Ciliwung. Itu karena Ciliwung berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sungai-sungai yang saat ini masih dalam pengerukan di antaranya Sungai BGR di Kelapa Gading, Jakarta Utara; Kali BCT di Jakarta Barat; dan Waduk Pluit. Selain itu, yang sudah dikeruk lainnya di antaranya Kali Sekretaris, Kali Cipinang, dan Kali Krukut. Adapun waduk yang dikeruk adalah Waduk Pluit, Kampung Rambutan, Cimanggis, dan Pondok Rangan. "Waduk lain tidak dikeruk karena sudah memadai daya tampungnya, seperti Waduk Kebon Melati," katanya di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Dinas SDA juga telah menangan 15 titik rawan genangan dari 30 titik yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Salah satunya di kawasan Cawang dan Jalan MT Haryono. Permasalahan genangan di daerah itu di-sebabkan rusaknya saluran air karena pemasangan tiang pancang proyek LRT. Saat ini sudah dibuat saluran yang baru.

Sebanyak 15 titik yang masih tersisa antara lain di Petogogan dan Pondok Jajar di Mampang karena luapan Kali Krukut, Bintaro, Kampung Melayu, Bidara Cina, Tubagus Angke, Patra Raya, dan Arjuna Selatan. Titik-titik rawan itu didominasi kawasan di bantaran sungai.



Timbunan sampah yang menumpuk di Kali Cikeas di kawasan Kampung Bubulak, Bojong Kulur, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Air hujan yang turun pada awal musim hujan menghanyutkan sampah beserta batang-batang bambu. Hal ini mengakibatkan aliran sungai terhambat dan berpotensi menyebabkan banjir di permukiman kawasan bantaran kali tersebut.

Menurut Juaini, pengerukan ditargetkan dapat mengurangi genangan atau setidaknya genangan tidak berlangsung lama. "Kalau curah hujan tinggi, air lambat mengalir. Kami harapkan surut 30 menit sampai 1 jam," ujarnya.

Ciliwung

Untuk Ciliwung, pihak Dinas SDA berkoordinasi dengan BBWSCC. "Kami ada forum bersama dan bisa berkoordinasi kalau ada pengerukan yang diperlukan di Ciliwung," ujarnya.

Terkait dengan program pemerintah, yaitu normalisasi sungai dengan pengerukan, pe-

lebaran, dan penturapan dinding kali, Juaini mengatakan, tahun ini ada 118 bidang lahan yang dibebaskan untuk proyek Ciliwung di Jakarta Selatan. Proses pemeriksaan dokumen lahan telah selesai. Tahapan selanjutnya pembayaran. Lahan ini terletak di Tanjung Barat hingga Pejaten Timur sepanjang sekitar 1,5 kilometer.

"Sudah selesai tahun ini, tinggal pembayaran saja," ujarnya. Diharapkan normalisasi dilanjutkan pada 2020.

Namun, di lapangan, diketahui sampai Oktober ini pembebasan lahan di Jakarta Selatan belum tuntas. Salah sa-

tunya di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang kerap banjir saat hujan.

Lokasi permukiman warga di RW 008 Kelurahan Pejaten Timur berada di bantaran Ciliwung. Saat hujan lebat, Selasa (8/10), bendungan Katulampa di Bogor berstatus Siaga 3. Tiga jam setelah itu, air sampai di Pejaten Timur pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.00. Ketinggian air yang masuk ke permukiman warga sekitar 1 meter. Air bertahan selama tiga jam sebelum surut.

Lurah Pejaten Timur Agus Letahid mengatakan, lokasi permukiman warga yang ter-

dampak banjir sudah masuk dalam program pembebasan lahan untuk normalisasi. Tanah mulai dibebaskan bertahap sejak 2016. Saat ini masih tersisa sekitar 170 bidang lahan yang ditargetkan selesai dibebaskan.

Terkait pembebasan lahan di Pejaten Timur, tambah Agus, Dinas SDA DKI juga menunggu tanda tangan dan persetujuan Gubernur DKI Jakarta. Tanda tangan itu belum diberikan Gubernur karena masih ada proses hukum terkait lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur. Warga menempuh jalur hukum dalam rencana pembangunan sodetan Ciliwung itu. (IIE/DEA)